

KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN PERMASALAHAN

Rizki Ananda¹, Yuyun Ayu Supia², Trisya Anjani³,
Mei Dinda Anggiani⁴, Wardana Surya⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id¹,
ayusupia404@gmail.com², trisyaaazani@gmail.com³,
meyd2269@gmail.com⁴, wardhanasuryaaa18@gmail.com⁵,

ABSTRACT

This study explores the competencies of primary education graduates and the challenges encountered in achieving them. Graduate competency serves as a critical indicator of the success of the primary education system. However, issues such as low teaching quality, inadequate learning facilities, and unequal access to education remain prevalent. This study adopts a qualitative approach through literature review to identify the factors influencing graduate competency. The findings indicate that improving graduate competency requires a relevant curriculum, enhanced teacher quality, and equitable distribution of educational resources.

Keywords: graduate competency, primary education, educational challenges, teaching quality, access to education

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kompetensi lulusan pendidikan dasar serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaiannya. Kompetensi lulusan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan dasar. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya kualitas pengajaran, kurangnya fasilitas belajar, dan ketimpangan akses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi lulusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi lulusan harus didukung oleh kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan sarana pendidikan.

Kata Kunci: kompetensi lulusan, pendidikan dasar, permasalahan pendidikan, kualitas pengajaran, akses pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan jenjang awal dalam sistem pendidikan formal yang berperan penting dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Kompetensi lulusan pendidikan dasar menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan proses pendidikan pada tahap ini. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan literasi dasar, numerasi, sikap sosial, serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendidikan dasar memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap lulusan mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi lulusan pendidikan dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak peserta didik yang lulus tanpa menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung secara memadai. Hal ini menjadi cerminan dari berbagai

permasalahan dalam sistem pendidikan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Masalah tersebut tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan yang secara umum memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang lebih kompleks yang memengaruhi mutu pendidikan dasar di Indonesia.

Permasalahan utama yang sering diidentifikasi mencakup rendahnya kualitas pengajaran, kurangnya pelatihan profesional bagi guru, minimnya sarana dan prasarana belajar, serta kurikulum yang kurang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Selain itu, faktor sosial-ekonomi keluarga dan lingkungan belajar juga berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi lulusan. Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seringkali mengalami keterbatasan dalam hal akses pendidikan yang bermutu. Situasi ini semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antarindividu.

Selain faktor internal dalam dunia pendidikan, kebijakan

pemerintah yang bersifat top-down dan tidak mempertimbangkan konteks lokal juga turut memperburuk situasi. Implementasi kurikulum yang seragam di seluruh wilayah, tanpa mempertimbangkan keberagaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal. Guru di daerah tertentu merasa kesulitan dalam menyesuaikan materi ajar dengan kemampuan siswa yang beragam. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pendidikan menjadi penting untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan secara merata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi lulusan pendidikan dasar serta berbagai permasalahan yang menghambat pencapaiannya. Penelitian ini penting sebagai kontribusi akademik dalam mengevaluasi sistem pendidikan dasar serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan, guru, dan praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Harapannya,

hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam kompetensi lulusan pendidikan dasar serta permasalahan-permasalahan yang menyertainya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara komprehensif, terutama yang berkaitan dengan persepsi, pengalaman, dan konteks sosial pendidikan dasar. Fokus utama penelitian bukan hanya pada pengukuran kuantitatif hasil belajar, tetapi juga pada pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kompetensi tersebut.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Peneliti menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, dan hasil survei nasional seperti Asesmen Nasional (AN).

Selain itu, data juga diperoleh dari laporan-laporan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu pendidikan dasar. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu hanya dokumen yang relevan dan kredibel yang dijadikan bahan analisis.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari dokumen dan literatur yang dikaji. Peneliti melakukan proses coding terhadap kutipan-kutipan penting yang berkaitan dengan kompetensi lulusan, tantangan pendidikan dasar, serta strategi peningkatan mutu pendidikan. Hasil coding tersebut kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema besar untuk dianalisis lebih lanjut secara naratif. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber informasi.

Subjek dalam penelitian ini bukan individu, melainkan wacana dan kebijakan yang terdapat dalam dokumen dan literatur. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau responden secara langsung. Meski demikian, temuan

yang dihasilkan tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami kondisi riil kompetensi lulusan pendidikan dasar di Indonesia, karena bersumber dari berbagai penelitian dan laporan yang telah melalui proses verifikasi akademik.

Tujuan dari metode ini adalah untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan kompetensi lulusan pendidikan dasar dan memberikan rekomendasi berbasis bukti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan hasil penelitian mampu menangkap kompleksitas permasalahan pendidikan dasar di berbagai konteks, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan kontekstual.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menjamin terselenggaranya

pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pendidikan dasar, hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan pendidikan yang dapat diakses semua anak usia sekolah, baik di perkotaan maupun di wilayah terpencil.

Kompetensi lulusan pendidikan dasar menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas dan kualitas sistem pendidikan nasional. Kompetensi ini mencakup kemampuan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Tujuan utama dari pendidikan dasar adalah membentuk peserta didik yang memiliki fondasi kuat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Namun, pada kenyataannya, banyak lulusan yang belum menunjukkan capaian yang memadai dalam aspek-aspek tersebut.

Permasalahan kompetensi lulusan tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dasar. Banyak guru yang masih menerapkan metode pembelajaran

konvensional yang bersifat satu arah dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Proses pembelajaran yang tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik membuat materi yang diajarkan sulit dipahami, sehingga berdampak pada rendahnya kompetensi siswa. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional harus "berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa."

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kompetensi lulusan adalah kualitas tenaga pendidik. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar kompetensi guru melalui UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak guru, khususnya di daerah tertinggal, belum mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kemampuan mengajar, sehingga

berpengaruh pada hasil belajar peserta didik.

Ketimpangan antarwilayah juga menjadi masalah serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah terpencil kerap mengalami kekurangan guru, keterbatasan infrastruktur, serta akses internet dan sumber belajar yang terbatas. Kondisi ini sangat kontras dengan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang lebih maju. Akibatnya, lulusan dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seringkali tidak mampu bersaing secara setara dengan lulusan dari daerah yang lebih maju, baik dalam ujian nasional maupun dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan menengah. Kesenjangan kualitas pendidikan ini menunjukkan bahwa belum tercapainya keadilan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh setiap

anak memiliki kualitas yang setara. Ini termasuk pemerataan guru, distribusi sumber daya, dan pengembangan kurikulum yang relevan.

Permasalahan kurikulum juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kompetensi lulusan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan karakter, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Banyak guru belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip kurikulum tersebut atau belum memiliki keterampilan untuk menerapkannya secara efektif. Akibatnya, kurikulum tidak dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Di samping itu, faktor sosial-ekonomi keluarga juga memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian kompetensi siswa. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk belajar seperti buku, alat tulis, atau akses ke les tambahan. Selain itu, kurangnya dukungan dari orang tua yang

berpendidikan rendah juga menjadi kendala dalam proses belajar anak di rumah. Ketimpangan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga perlu didukung oleh kondisi sosial ekonomi yang mendukung.

Pendidikan inklusif juga masih menjadi tantangan di tingkat pendidikan dasar. Banyak siswa dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah umum seringkali belum siap baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas untuk menerima dan mendidik siswa berkebutuhan khusus. Padahal, prinsip inklusi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tercantum dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Evaluasi kompetensi lulusan melalui Asesmen Nasional yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebenarnya menjadi langkah positif dalam mengukur secara lebih komprehensif capaian pendidikan. Asesmen ini tidak hanya mengukur hasil belajar kognitif, tetapi juga

menilai iklim belajar dan karakter siswa. Namun demikian, penggunaan hasil asesmen ini masih belum maksimal dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang bersifat korektif dan progresif. Seringkali data hanya menjadi formalitas tanpa diikuti dengan intervensi nyata di sekolah-sekolah yang memiliki nilai rendah.

Permasalahan lainnya adalah adanya beban administrasi yang tinggi bagi guru, terutama dalam pelaporan dan pelaksanaan kurikulum. Guru seringkali dihadapkan pada berbagai dokumen perencanaan pembelajaran yang menyita waktu dan energi, sehingga mengurangi fokus mereka dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Beban administrasi yang berlebihan ini justru melemahkan esensi profesi guru sebagai pendidik yang seharusnya fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu memberikan dampak yang besar terhadap capaian kompetensi lulusan pendidikan dasar. Banyak siswa yang kehilangan waktu belajar efektif akibat pembelajaran jarak jauh yang

tidak optimal, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur digital memadai. Learning loss ini menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi dalam membenahi mutu pendidikan dasar pasca-pandemi.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan adalah penguatan peran guru sebagai agen perubahan. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menyesuaikan materi dengan konteks siswa. Oleh karena itu, pelatihan guru yang berkelanjutan dan berbasis praktik nyata sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka dalam mengajar. Program-program afirmatif seperti penempatan guru profesional di daerah 3T melalui program PPG dan Guru Penggerak juga harus diperluas cakupannya. Pemerintah perlu memberikan insentif yang memadai agar guru-guru berkualitas bersedia mengajar di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang lokasi geografis,

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan juga perlu diperkuat. Sekolah tidak boleh berjalan sendiri dalam membentuk kompetensi siswa. Partisipasi orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat juga dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang bersifat sosial dan budaya.

Reformasi kurikulum juga harus diarahkan pada penyederhanaan materi dan penyesuaian konteks lokal. Pembelajaran yang terlalu padat dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa hanya akan membebani peserta didik tanpa memberikan dampak nyata terhadap kompetensi mereka. Kurikulum yang fleksibel dan adaptif justru lebih efektif dalam membentuk kompetensi yang dibutuhkan di era global.

Aspek penilaian juga harus diubah dari penilaian berbasis angka

semata menjadi penilaian yang mendorong pemahaman konsep, kreativitas, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penilaian formatif yang berkelanjutan dan bersifat reflektif lebih mampu menggambarkan perkembangan kompetensi siswa secara utuh. Oleh karena itu, guru juga perlu dibekali dengan kemampuan melakukan asesmen autentik.

Pemerintah juga harus meningkatkan anggaran pendidikan untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." Amanat ini harus dijalankan dengan transparan dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan dampak pada mutu pendidikan.

Upaya digitalisasi pendidikan juga harus terus dikembangkan namun tidak mengabaikan kesiapan sekolah dan guru. Digitalisasi tanpa pelatihan dan infrastruktur hanya

akan memperlebar kesenjangan digital antarwilayah. Oleh karena itu, program digitalisasi harus dibarengi dengan penyediaan perangkat, pelatihan guru, serta pengembangan konten yang sesuai dengan konteks lokal.

Evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional secara berkala menjadi penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan menjadi kunci keberhasilan reformasi sistem pendidikan.

Terakhir, penting bagi setiap pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk memiliki visi dan komitmen yang sama dalam meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan dasar. Peningkatan mutu pendidikan bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Sinergi antara kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang

konsisten, dan pengawasan yang kuat akan menjadi fondasi untuk membentuk generasi yang kompeten dan berdaya saing.

D. Kesimpulan

Kompetensi lulusan pendidikan dasar merupakan cerminan dari kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Permasalahan kompetensi yang masih rendah di kalangan lulusan SD dan SMP menunjukkan bahwa berbagai aspek seperti kurikulum, kualitas guru, sarana prasarana, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Ketimpangan wilayah, ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas, serta rendahnya literasi dasar menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha dalam memperbaiki kualitas pendidikan dasar. Upaya reformasi kurikulum, peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas yang layak, serta pemanfaatan teknologi secara bijak harus menjadi prioritas. Hanya dengan cara tersebut, lulusan

pendidikan dasar di Indonesia dapat memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan bersaing di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. L. P. S., & Yudarta, I. N. (2020). Pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(1), 45–52.
- Azizah, A., & Mulyani, N. (2022). Kompetensi lulusan sekolah dasar dalam menghadapi era digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 4(3), 221–230.
- Budiyanto, B., & Suparno, S. (2021). Persepsi guru terhadap Kurikulum Merdeka dan implementasinya di SD. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 13(2), 157–167.
- Fitriyah, N., & Lestari, S. (2023). Analisis kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 38–47.

- Hartati, S. (2020). Permasalahan pendidikan dasar di daerah terpencil dan solusinya. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 5(2), 105–112
- Kusuma, H., & Wahyuni, E. S. (2021). Evaluasi kompetensi dasar siswa melalui Asesmen Nasional. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(3), 213–224.
- Pratama, R. Y., & Utami, L. (2022). Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah: Studi kasus provinsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9(1), 1–14.
- Rohman, A., & Putri, F. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kompetensi lulusan pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(4), 299–310.
- Sari, M. D., & Hidayat, R. (2020). Faktor sosial ekonomi keluarga dan pencapaian belajar siswa SD. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(2), 127–134.
- Yuliana, E., & Nugroho, A. (2022). Pengaruh pelatihan guru terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 15(1), 77–86.
- 1.